

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JAWA BARAT SELATAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Ikmal Fasha Agniy*, Ani Heryani

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *kmal93@gmail.com

ABSTRAK

Pantai-pantai di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Selatan, memiliki potensi besar sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, penting untuk menerapkan kebijakan pengembangan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan terhadap efektivitas pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi untuk menganalisis data yang diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Tasikmalaya. Faktor-faktor seperti alokasi anggaran, perencanaan infrastruktur, pelibatan masyarakat lokal, dan upaya pelestarian lingkungan memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan objek wisata pantai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Efektivitas

PENDAHULUAN

Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi wisata pantai yang cukup besar, termasuk pantai-pantai seperti Pantai Karang Hawu, Pantai Cipatujah, dan Pantai Sawarna. Potensi tersebut mencakup keindahan alam, potensi ekonomi, dan peluang pengembangan pariwisata yang signifikan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata pantai, dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur tata kelola wisata, pemeliharaan lingkungan, serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas wisata.

Kebijakan yang baik dalam pengembangan objek wisata pantai haruslah holistik, mempertimbangkan berbagai aspek seperti pelestarian lingkungan, keberlanjutan, keamanan, dan kesejahteraan komunitas lokal. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang baik, pantai dapat menjadi sumber daya yang

berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan dalam pengembangan objek wisata pantai sangat penting karena pantai adalah salah satu jenis objek wisata yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata suatu daerah.

Istilah kebijakan Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2009) menyatakan: "Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah". Menurut Edward III dan Sharkansky (Joko, 2001) mengemukakan bahwa: *"What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs"*. Dari pernyataan tersebut mengandung pemahaman bahwa tujuan atau maksud dari program pemerintah dapat diidentifikasi melalui tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta melalui komunikasi resmi yang disampaikan kepada publik.

Setiap kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan atau diimplementasikan dalam mencapai tujuannya, sehingga dikatakan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih (Hoogerwerf, 1992)". Implementasi kebijakan publik sangat penting karena berperan dalam mewujudkan tujuan dan visi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai manfaat yang diharapkan dari kebijakan publik, implementasi harus dilakukan secara cermat, efisien, dan adil. Selain itu, perlu pula transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pantai merupakan ekosistem yang sangat sensitif dan rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Kebijakan yang baik dapat membantu dalam pelestarian lingkungan pantai, termasuk perlindungan terhadap terumbu karang, ekosistem pesisir, dan keanekaragaman hayati laut. Kebijakan dapat membantu dalam mengatur jumlah pengunjung, aktivitas yang diperbolehkan, dan infrastruktur yang dibangun di pantai, yang dapat mencegah over-tourism dan menjaga kualitas pengalaman wisatawan. Kebijakan yang baik mencakup masalah keamanan di pantai, seperti pemantauan perairan, penyelamatan, dan tanda peringatan yang diperlukan untuk melindungi wisatawan dari bahaya seperti arus laut kuat dan perairan dalam.

Wisata pantai dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi komunitas lokal. Kebijakan yang baik dapat mengarahkan investasi ke daerah tersebut, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan lokal. Melalui adanya kebijakan dapat membantu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di sekitar pantai, seperti jalan, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya. Ini memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan karakter alamiah pantai dan kebutuhan wisatawan. Kebijakan yang baik dapat melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pantai. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Kebijakan dapat mendukung upaya promosi wisata pantai, baik secara nasional maupun internasional, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kebijakan tentang pengembangan Jawa Barat Selatan telah secara khusus memuat tentang pengembangan pariwisata di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan tersebut mencakup alokasi anggaran, pengembangan infrastruktur, promosi wisata, dan upaya lainnya yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan objek wisata pantai, dengan memiliki potensi besar, pengelolaan objek wisata pantai seringkali menghadapi sejumlah tantangan, seperti masalah lingkungan, pengawasan, keberlanjutan, dan manajemen sumber daya manusia.

Efektivitas dalam pengelolaan objek wisata pantai selatan memiliki banyak dampak positif dan penting, baik bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan industri pariwisata secara keseluruhan. Pantai-pantai selatan seringkali memiliki ekosistem yang rentan dan berharga, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan satwa liar. Pengelolaan yang efektif dapat membantu melindungi lingkungan alamnya dari kerusakan dan degradasi akibat aktivitas wisata yang berlebihan. Dengan pengelolaan yang baik, objek wisata pantai selatan dapat dijalankan dengan cara yang lebih berkelanjutan, yang berarti bahwa destinasi ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa merusak sumber daya alam atau budaya yang ada.

Wisata pantai selatan dapat menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pengelolaan yang efektif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, misalnya melalui usaha-usaha perhotelan, restoran, dan toko souvenir. Dengan mengelola objek wisata dengan baik, risiko dan bahaya bagi wisatawan dapat diminimalkan, yang mencakup penanganan keadaan darurat, peraturan keamanan, dan pengawasan area pantai untuk menghindari kecelakaan.

Pelestarian budaya merupakan bagian penting dalam pengembangan wisata pantai selatan, dimana objek wisata pantai selatan memiliki nilai budaya yang tinggi, seperti desa nelayan tradisional atau situs sejarah. Pengelolaan yang efektif dapat membantu melestarikan warisan budaya ini dan memungkinkan wisatawan untuk belajar lebih banyak tentang budaya lokal. Dengan mengelola objek wisata secara efektif, pengalaman wisatawan dapat ditingkatkan. Fasilitas yang baik, informasi yang akurat, dan pelayanan yang ramah dapat membuat kunjungan lebih menyenangkan bagi wisatawan, dan hal tersebut dapat membantu menarik lebih banyak kunjungan di masa depan.

Pantai selatan seringkali menjadi destinasi yang populer, dan pengelolaan yang efektif dapat membantu mengatur jumlah wisatawan yang datang agar tidak berlebihan, dimana dapat mencegah kerusakan lingkungan dan over-tourism. Objek wisata yang dikelola dengan baik cenderung memiliki reputasi yang baik di mata wisatawan, yang dapat membantu menarik lebih banyak pengunjung dan menciptakan peluang promosi yang positif. Pengelolaan objek wisata pantai selatan yang efektif melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta, serta pengembangan rencana tata kelola yang baik. Selain itu, perlu juga

perhatian terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan dinamika pasar pariwisata agar pengelolaan tetap relevan dan berkelanjutan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara kebijakan dan perkembangan pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat (Zaki Irwan, 2016). Penelitian selanjutnya menunjukkan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan mengalami tantangan dan hambatan, terutama dari kurangnya dukungan masyarakat setempat atau kelompok-kelompok kepentingan (Adi Setiadi, dkk., 2021). Kunci utama dalam proses pengembangan wisata pantai yaitu menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata pantai yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, implementasi kebijakan pengembangan wisata pantai dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak terlibat.

Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan telah berdampak pada efektivitas pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan potensi wisata pantai dan memastikan berkelanjutan sektor pariwisata. Hasil penelitian yang baik dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata pantai, mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun responden penelitian ini yaitu Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 43 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan penggunaan angket penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis regresi berganda, yang selanjutnya dilakukan analisis jalur untuk mengetahui besar pengaruh dari setiap variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki beberapa potensi objek wisata pantai yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa pantai tersebut diantaranya Pantai Karanghawu terletak di Desa Karanghawu, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Tasikmalaya. Pantai ini terkenal dengan panorama alamnya yang indah, dengan tebing-tebing karang yang menghampar di sepanjang pantai. Selain itu, pantai ini juga populer untuk olahraga selancar, dan sering digunakan sebagai lokasi kompetisi selancar.

Pantai Sawarna merupakan salah satu pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Tasikmalaya. Pantai ini memiliki pasir putih yang luas dan ombak yang cocok untuk berenang dan berselancar. Selain itu, Pantai Sawarna juga dikelilingi oleh hutan dan tebing, yang menambah keindahan alamnya. Selanjutnya terdapat Pantai Cibangan terletak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan ombak yang cukup tenang, sehingga cocok untuk berenang dan bermain air. Di sekitar pantai, dapat menikmati berbagai makanan laut segar di warung-warung pantai.

Keberadaan pantai Sindangkerta dimana merupakan pantai kecil yang terletak di Kecamatan Sindangkerta dikenal dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Pengunjung dapat menikmati pantai yang bersih dan pemandangan matahari terbenam yang indah di sini. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan suatu upaya pemerintah untuk mendorong untuk tumbuh kembangnya pariwisata pantai, dan menjadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih memiliki strategi dalam pengembangan objek wisata pantai yang dimilikinya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan objek wisata pantai, perlu dilakukan perencanaan yang baik, konservasi lingkungan yang ketat, promosi yang efektif, pembangunan infrastruktur yang memadai, partisipasi masyarakat lokal, dan pemantauan terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kualitas pengalaman wisatawan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pengembangan objek wisata pantai. Beberapa faktor utama termasuk:

1. Kekurangan perencanaan yang baik
Tanpa perencanaan yang matang, pengembangan objek wisata pantai bisa menjadi tidak efektif. Ini mencakup pemilihan lokasi yang tepat, pengelolaan tata ruang, infrastruktur, dan fasilitas yang diperlukan.
2. Kurangnya konservasi terhadap lingkungan
Penyelamatan lingkungan pantai yang kurang dapat merusak daya tarik wisata. Sampah, polusi air, kerusakan ekosistem, dan pembangunan yang tidak terkendali dapat mengurangi daya tarik pantai.
3. Tingkat keselamatan masih kurang
Pantai yang tidak memiliki tindakan keselamatan yang memadai untuk wisatawan dapat menjadi tidak efektif. Kurangnya penjaga pantai, kurangnya peringatan, atau kurangnya fasilitas penyelamatan dapat menyebabkan risiko yang tidak perlu.
4. Kurangnya pemasaran dan promosi
Tanpa upaya pemasaran dan promosi yang cukup, objek wisata pantai mungkin tidak akan mencapai potensi maksimal dalam menarik pengunjung. Dibutuhkan strategi pemasaran yang baik untuk menjangkau audiens yang tepat.

5. Infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan yang buruk, kurangnya fasilitas umum, dan kurangnya akomodasi, dapat mengurangi efektivitas objek wisata pantai.

6. Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal

Keterlibatan dan dukungan masyarakat lokal sering kali penting dalam pengembangan objek wisata pantai. Tanpa dukungannya, pengembangan dapat menghadapi hambatan politik dan sosial.

7. Musim wisata yang terbatas

Pantai yang hanya menarik wisatawan pada musim tertentu dapat memiliki efektivitas yang rendah jika tidak ada upaya untuk menarik pengunjung sepanjang tahun.

8. Masalah keamanan

Tingkat keamanan yang rendah di sekitar objek wisata pantai, termasuk risiko pencurian atau kejahatan lainnya, dapat membuat wisatawan merasa tidak aman dan menghindari destinasi tersebut.

9. Regulasi yang berlebihan

Terlalu banyak regulasi dan birokrasi dalam pengembangan objek wisata pantai dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi.

Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan terhadap efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya dihitung melalui regresi berganda melalui program statistik dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1
Output Statistik

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853 ^a	.728	.699	4.589153

a. Predictors: (Constant), Environmental factor, Kelompok sasaran (target groups), Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), Implementing organization

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2085.538	4	521.385	24.757	.000 ^a
	Residual	779.232	37	21.060		
	Total	2864.771	41			

a. Predictors: (Constant), Environmental factor, Kelompok sasaran (target groups), Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), Implementing organization

b. Dependent Variable: Efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.052	2.819		2.147	.038
	Kebijakan yang diidealkan (idealised policy)	.676	.616	.203	1.096	.280
	Kelompok sasaran (target groups)	1.017	.788	.201	1.291	.205
	Implementing organization	2.007	1.633	.377	1.229	.227
	Environmental factor	.566	1.281	.157	.442	.661

a. Dependent Variable: Efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya

Analisis data secara simultan (bersama-sama) dijelaskan sebagai berikut :

- Angka R_{square} (R^2 /Koefisien Determinasi) atau disebut dengan nilai pengaruh diketahui sebesar 0,728, artinya sebesar 72,8% efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan, sedangkan sisanya ($100\% - 72,8\% = 27,2\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
- Berdasarkan nilai probabilitas diketahui 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya, dengan implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi wisata pantai yang cukup besar, namun belum sepenuhnya teroptimalkan. Kebijakan Pengembangan Jawa Barat Selatan sebagai kebijakan regional yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Jawa Barat Selatan, termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Implementasi kebijakan mendorong untuk meningkatkan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan pelatihan bagi pengelola objek wisata pantai yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun dampak positif kebijakan bisa menghasilkan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Ini bisa menjadi tantangan jika infrastruktur dan layanan belum siap untuk menangani lonjakan tersebut.

Melalui peningkatan kunjungan wisatawan dapat berdampak negatif pada lingkungan pantai jika tidak ada upaya yang cukup untuk pengelolaan lingkungan. Pengelola objek wisata perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan kepada wisatawan dengan baik, dimana pemerintah setempat perlu memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk memastikan pengelolaan objek wisata berjalan sesuai rencana dan regulasi. Bagian penting lainnya perlu lebih melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan objek wisata dimana dapat meningkatkan perasaan memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat.

Langkah terakhir yaitu pentingnya evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan dalam pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Tasikmalaya. Evaluasi ini harus mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Dengan mengkaji dampak implementasi kebijakan ini dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan objek wisata pantai, Kabupaten Tasikmalaya dapat memanfaatkan potensi pariwisata secara maksimal sambil menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam dan budayanya. Pada akhirnya untuk meningkatkan efektivitas pengembangan objek wisata pantai, perlu dilakukan perencanaan yang baik, konservasi lingkungan yang ketat, promosi yang efektif, pembangunan infrastruktur yang memadai, partisipasi masyarakat lokal, dan pemantauan terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kualitas pengalaman wisatawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan terhadap efektivitas pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), kelompok sasaran (*target groups*), *implementing organization* dan *environmental factor*. Setiap variabel memiliki pengaruh terhadap pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Tasikmalaya, dimana variabel *implementing organization* merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar, sementara variabel *environmental factor* memiliki pengaruh paling kecil terhadap efektivitas pengelolaan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Setiadi, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Universitas Galuh Ciamis.
- Hoogerwerf. (1992). *Ilmu Pemerintahan* (Tobing (ed.)). Erlangga.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Joko, W. (2001). *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia.
- Zaki Irwan. 2016. Analisis Dampak Kebijakan dan Perkembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosio-Ekonomi Masyarakat Gili Trawangan. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.